

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam banyak catatan sejarah, perkembangan peradaban manusia selalu berkaitan dengan masalah politik, mulai dari berdirinya kerajaan, kemunduran dan keruntuhan dinasti, pergolakan politik dan lain sebagainya selalu menjadi topik yang sering di bahas dalam banyak buku sejarah, tak terkecuali dalam catatan sejarah nasional kita.

Catatan sejarah nasional kita hampir di dominasi dengan tema politik. Mulai dari berdirinya kerajaan Hindu Budha seperti Mataram dan Majapahit misalnya, kemudian masa penyebaran kerajaan-kerajaan Islam, masa kolonialisme, masa reformasi, orde lama dan orde baru begitu pula masa reformasi. Catatan sejarah yang di ajarkan di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi pasti selalu membahas tema yang sama yaitu tentang politik. Maka tak berlebihan apabila dikatakan politik selalu menjadi manifestasi dari proses perkembangan manusia. Lalu apa itu politik?

Kata politik berasal dari bahasa Yunani "*politicos*" yang merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan warga negara. Dalam bahasa Inggris politik memiliki makna yang mencakup kebijaksanaan, beradab, berakal. Secara umum politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan di dalam masyarakat, termasuk proses pengambilan keputusan, terutama di tingkat negara.¹

Politik juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menentukan aturan yang dapat di terima oleh mayoritas penduduk dan menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat.²

¹ Thomas T Pureklolon, *Demokrasi Dan Politik: Menelisik Dinamika Kekuasaan, Sosial, Budaya Dan Pancasila* (Malang: Intrans Publishing, 2019). Hal 10.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hal 16.

Andrew Heywood menyatakan bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengubah peraturan umum yang mengatur kehidupan yang melibatkan unsur konflik dan kerja sama yang tak terhindarkan.³

Menurut Rod Hague, politik melibatkan cara kelompok-kelompok mencapai keputusan bersama yang mengikat melalui usaha untuk mengatasi perbedaan diantara anggotanya.⁴

Dalam negara demokratis, yang dimaksud kelompok-kelompok ini juga dapat dianggap sebagai partai politik. Hal ini karena menurut Miriam Budiardjo partai politik pada umumnya adalah sebuah kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan tujuan yang sama. Kelompok ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut posisi politik melalui jalur konstitusional guna melaksanakan program-programnya.⁵

Dalam undang-undang RI No. 31 tahun 2002 pasal 1 di jelaskan bahwa yang dimaksud partai politik adalah organisasi politik yang di bentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Di negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik memiliki peranan penting, salah satunya sebagai media untuk komunikasi politik.⁶ Arus informasi di negara tersebut berjalan dalam dua arah, yaitu dari pemerintah ke masyarakat dan juga sebaliknya.⁷

Sigmund Neumann menjelaskan dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan organisasi perantara yang menghubungkan

³ Budiardjo. hal 16

⁴ Budiardjo. hal 16.

⁵ Budiardjo. Hal 16

⁶ Budiardjo. Hal 406.

⁷ Miriam Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1982). Hal 14.

kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.⁸

Menurut Rush dan Althof, komunikasi politik dapat dijelaskan sebagai proses pengiriman informasi yang berhubungan dengan politik dari satu sistem politik ke sistem politik lainnya, dan keterkaitan antara sistem sosial dan sistem politik merupakan elemen yang dinamis dalam suatu sistem politik. Selain itu, proses sosialisasi, partisipasi dan rekrutmen politik juga tergantung dari komunikasi.⁹

Dari hal ini dapat diketahui bahwa kemampuan komunikasi menjadi poin penting untuk dimiliki bagi para politikus atau pelaku politik dalam hal ini anggota partainya. Sukses atau tidaknya suatu partai politik dalam sistem demokrasi ditentukan dari perolehan jumlah suara yang diperoleh pada saat kontestasi pemilihan dalam hal ini bisa disebut juga pemilu atau pemilihan umum. Maka dari itu partai politik perlu menyusun strategi untuk mendulang suara pada saat kampanye berlangsung.

Kampanye politik merupakan upaya yang teratur dan terencana untuk mendukung pencalonan, dan pemilihan seseorang dalam sebuah jabatan resmi.¹⁰ Menurut UU tahun 2003 pasal 1 kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih. Dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2005 pasal 1, kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon yang akan mencalonkan dan informasi lainnya, dan bertujuan mengenalkan dan meyakinkan pemilih.¹¹

Salah satu negara yang menganut sistem demokrasi adalah Indonesia. Dalam konteks ini, hadirnya partai politik di Indonesia juga mencerminkan keterlibatan rakyat dalam menentukan pemimpin negara.

⁸ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. hal 406.

⁹ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia* (Bandiung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008). Hal 24.

¹⁰ Toni Adrianus Pito, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013). Hal 186.

¹¹ Gungun Heryanto, *Publik Relation Politik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). Hal 83.

Di Indonesia sendiri partai politik awalnya muncul pada masa kolonialisme sebagai hasil dari bangkitnya kesadaran nasional. Pada saat itu, semua organisasi baik yang memiliki tujuan sosial maupun yang secara terbuka mengadopsi prinsip politik atau agama, memainkan peranan penting dalam perkembangan gerakan nasional. Pola kepartaian pada masa tersebut menunjukkan keberagaman, dan pola ini kemudian dirumuskan dalam bentuk sistem multi partai setelah kemerdekaan.

Sejak meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengadakan 12 kali pemilihan umum. Dalam semua kontestasi pemilihan umum tersebut berlangsung, partai-partai Islam selalu ikut serta tanpa terkecuali. Namun demikian, pada setiap pelaksanaan pemilu, partai politik yang berbasis Islam tidak pernah berhasil mendapatkan mayoritas suara, lebih-lebih pada masa pemerintahan rezim Orde Baru dimana suara-suara yang bertentangan dengan rezim di tekan dengan berbagai cara, situasi ini sangat mengejutkan mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim.

Namun, situasi berubah saat masa reformasi dimulai setelah pemerintahan Presiden Soeharto jatuh pada tanggal 21 Mei 1998. Demonstrasi massa yang besar mendorong perubahan dalam berbagai aspek termasuk bidang kebebasan politik, pers, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Presiden B.J Habibie yang menggantikan Soeharto membuka pintu lebar-lebar untuk demokrasi yang lebih baik, termasuk kebebasan pers dan pendirian partai politik baru. Era baru ini disebut sebagai masa perubahan yang radikal dalam politik yang di gembar-gemborkan dengan antusias.

Kebijakan Presiden B.J Habibie yang membebaskan pendirian partai politik direspon baik oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya ratusan partai politik baru di Indonesia, dengan jumlah kurang lebih 181 partai politik. Langkah ini diikuti oleh pemilu yang diadakan lebih awal pada bulan juni 1999. Dalam pemilu pertama era reformasi ini, tidak semua partai politik yang terdaftar dapat

berpartisipasi pada pemilu, hal ini dikarenakan partai-partai tersebut tidak lolos verifikasi, hanya 48 partai politik yang berhak turut serta dalam pemilu tersebut.¹²

Namun demikian lagi-lagi partai-partai Islam harus meminimum pil pahit. Hal ini karena ternyata hasil pemilu 1999 menunjukkan bahwa perolehan partai politik Islam jauh lebih rendah dibandingkan dengan partai politik non-Islam. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah eksis selama hampir 25 tahun hanya berhasil meraih 58 kursi di DPR dari total 462 kursi yang di perebutkan. Partai Bulan Bintang (PBB) mendapatkan 13 kursi. Sedangkan Partai Keadilan (PK) memperoleh 7 kursi. Partai Nahdatul Ummah mendapatkan 5 kursi. Sedangkan tiga partai lainnya yaitu Partai Kebangkitan Ummat, Partai Syarikat Islam, dan Partai Masyumi, masing-masing hanya berhasil meraih satu kursi.¹³

Partai Keadilan (PK), yang merupakan cikal bakal PKS saat ini, adalah salah satu dari banyaknya partai baru yang muncul selama era reformasi. Partai ini lahir pada tanggal 20 juli 1998 dalam sebuah konferensi pers di aula masjid al azhar, kebayoran baru, Jakarta, dengan ketua pertamanya adalah Nurmahmudi Ismail. Partai ini lahir sebagai hasil dari gerakan sosial keagamaan yang terjadi antara tahun 1980-an dan reformasi yang bermula dari gerakan dakwah kampus atau dari gerakan tarbiyah.¹⁴ Kemunculan awal gerakan dakwah kampus ini tidak bisa di lepaskan dari pengaruh pemikiran kalangan modernis Islam yang lebih dulu berkembang di timur tengah.

Pada tahun 1999, dalam keikutsertaan pertamanya pada kontestasi pemilu, PK gagal mencapai ambang batas minimal yang memungkinkan partai ini untuk ikut berkompetisi pada pemilu berikutnya. Satu-satunya cara agar partai ini dapat ikut serta pada pemilu berikutnya yaitu dengan membentuk partai baru. Hal ini lah yang mengilhami berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tanggal 20 April 2002. Kemudian pada pemilu tahun 2004, PKS berhasil meraih 7,34% atau 45 dari 550

¹² Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. hal 449.

¹³ Budiardjo. Hal 342

¹⁴ Burhanudin Muhtadi, *Dilema PKS, Suara Dan Syariah* (Jakarta: Pustaka Populer Gramedia, 2012). Hal 32-37.

kursi yang di perebutkan. Hal ini merupakan capaian yang luar biasa bagi partai yang baru saja lahir itu.¹⁵

Kabupaten Tasikmalaya adalah satu dari sekian kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Tasikmalaya di huni oleh kurang lebih 1.876.544 jiwa dengan lebih dari 99% penduduknya beragama Islam.¹⁶

Sebagai sebuah kabupaten dengan komunitas muslim yang banyak, Tasikmalaya sudah dari dulu terkenal dengan kegiatan keagamaannya yang kental. Hal ini di karenakan banyaknya pondok pesantren yang bertebaran di setiap sudut desa di kabupaten ini. Maka tak aneh apabila Kabupaten Tasikmalaya ini di kenal dengan julukan kota santri.

Di lihat dari latar belakang ini, tentu Kabupaten Tasikmalaya menjadi primadona bagi partai politik Islam untuk mendulang suara yang banyak, tak terkecuali bagi PKS. Namun apakah PKS mampu untuk mendulang suara yang banyak di Kabupaten Tasikmalaya ini?

Hal ini lah yang menjadi salah satu alasan penulis merasa tertarik untuk lebih mengkaji lebih dalam tentang topik pembahasan ini. Selain dari pada itu, penulis sendiri berdomisili di daerah Kabupaten Tasikmalaya ini, sehingga diharapkan dapat mempermudah dalam menjangkau akses yang akan di teliti. Untuk membatasi masalah yang dikaji, penulis dalam hal ini lebih memfokuskan fokus kajiannya pada strategi kampanye partainya dengan perodesasi yang diambil yaitu mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2019. Periode ini diambil dari mulai keikutsertaannya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu tahun 2004.

Alasan lain kenapa penulis mengambil judul penelitian ini adalah karena belum adanya yang mengkaji lebih dalam tentang hal tersebut. Namun penulis mengakui bahwa memang sudah banyak penulis-penulis lain yang memiliki tema yang sama dengan apa yang penulis angkat, namun penulis meyakini berdasarkan

¹⁵ Muhtadi. Hal 47

¹⁶ Data ini di dapat dari website <https://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenTasikmalaya> , di akses pada tanggal 12 juni 2023.

dari penelusuran penulis bahwa apa yang penulis akan tulis berbeda dengan penulis-penulis lainnya. Hal ini dikarenakan berbedanya objek kajian yang teliti, dalam hal ini penulis mengambil objek pada PKS di Kabupaten Tasikmalaya.

Dari beberapa alasan di atas, penulis mengangkat judul tentang **“STRATEGI KAMPANYE PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU TAHUN 2004-2019 DI KABUPATEN TASIKMALAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan PKS di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apa strategi kampanye yang digunakan oleh PKS pada pemilu tahun 2004-2019 di Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan PKS di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh PKS pada pemilu tahun 2004-2019 di Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kajian Pustaka

Rencana penelitian tentang “Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Tahun 2004-2019 Di Kabupaten Tasikmalaya” ini tidak semata-mata dibuat begitu saja tanpa melihat karya-karya orang lain sebagai pembanding. Penulis telah melakukan observasi ke lapangan guna mencari buku, jurnal, maupun skripsi yang telah di teliti lebih dulu terkait dengan tema ataupun judul yang terkait dengan judul yang penulis ambil.. Hasil dari observasi tersebut penulis menemukan buku dan skripsi yang membahas hal tersebut yaitu:

1. Skripsi dengan judul *“Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Di Bekasi Tahun 1998-2014”*. Skripsi ini di tulis oleh Fuji Maulana mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2017. Skripsi ini menguraikan tentang proses berdirinya PKS di Bekasi dan juga menguraikan bagaimana partai PKS ini berkembang disana. Selain itu dalam skripsi ini di jelaskan pula tentang proses kaderisasi yang di lakukan oleh partai PKS ini. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada tempat penelitian tersebut di lakukan yang mana saya melakukan penelitiannya di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, dalam skripsi ini terlihat lebih general karena yang dibahas adalah perkembangan partainya, sedangkan skripsi yang akan saya teliti lebih memfokuskan pada kajian strategi kampanyenya.
2. Skripsi dengan judul *“Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Kota Cimahi Pada Pemilu 2014-2019”*. Skripsi ini di tulis oleh Muhammad Fahrul Fauzi, mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang di tulis pada tahun 2021. Skripsi ini menguraikan materi tentang proses pembentukan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Cimahi dan juga perkembangannya hingga tahun 2019. Selain itu dalam skripsi ini juga di uraikan mengenai strategi Partai Keadilan Sejahtera Kota Cimahi dalam meningkatkan perolehan suara pada pemilu tahun 2014-2019. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya terletak pada lokasi penelitian yang di lakukan dan juga fokus kajian yang di ambil.
3. Skripsi dengan judul *“Model Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Dan Tingkat Perolehan Suara Tahun 2004-2014”*. Adapun penulis skripsi ini adalah Dini Nuraini Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini di tulis pada tahun 2017. Skripsi ini menguraikan mengenai sejarah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera dan keberadaannya di Kabupaten Garut tahun 2004-2014. Selain

dari itu skripsi ini juga menguraikan mengenai model kampanye yang di lakukan PKS serta dampaknya pada perolehan suara yang di dapat. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya adalah pada lokasi penelitian di lakukan dan juga fokus kajiannya.

E. Metode Penelitian

1. Heuristik

Tahapan heuristik yaitu tahapan atau kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, dan data tentang peristiwa masa lampau. Oleh karena itu pada tahapan ini penulis melakukan observasi dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, guna menghimpun sumber, baik itu sumber lisan maupun sumber tulisan yang kemudian di klasifikasikan ke dalam dua kategori sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data atau keterangan yang di peroleh dari tangan pertama sebagai bukti untuk menjelaskan suatu peristiwa, tokoh maupun objek. Berikut merupakan sumber primer yang penulis peroleh:

1) Sumber Tulisan

- a) Hasil Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2004 Sampai Tahun 2019 Di Kabupaten Tasikmalaya.
- b) Raihan Kursi Di DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pada Pemilu Tahun 2004 Sampai Tahun 2019.
- c) Daftar Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pada Pemilu Tahun 2004 Sampai 2019.
- d) Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 006/SKEPJ/AJ-PKS/1439 Tentang

Perubahan Struktur Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya Periode 2015-2020.

- e) Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat Nomor: 047.PD.2/AJ-PKS/2022 Tentang Struktur Dan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2020-2015.
- f) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera.
- g) Falsafah Dasar dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera Yang Di Susun Oleh Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Cetakan Ke 1 Tahun 2008.
- h) Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2004/2005.
- i) Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2009.
- j) Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2014.
- k) Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2019.
- l) Statistik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

2) Lisan

- a) Wawancara dengan bapak Lukman Farid. Beliau merupakan kepala kesekretariatan DPP Partai Keadilan Sejahtera. Wawancara ini di lakukan pada tanggal 15 Maret 2022.
- b) Wawancara dengan bapak Ruli Irawan, usia 23 tahun. Beliau menjabat sebagai ketua DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya periode 2020-2025. Wawancara ini di lakukan pada tanggal 30 Juli 2023.
- c) Wawancara dengan Ibu Rossy Hermawaty S. Si, usia 49 tahun. Beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya selama tiga periode yaitu periode 2009-2014,

periode 2014-2019, dan periode 2019-2024. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 25 Juli 2023.

- d) Wawancara dengan bapak Dedi Kurniawan ST. MM, usia 47 tahun. Beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2019-2024. Beliau juga menjabat sebagai sekretaris MPD (Majlis Pertimbangan Daerah) periode 2020-2025. Wawancara ini di lakukan pada tanggal 23 juli 2023.
- e) Wawancara dengan ibu Ucu Dewi Syarifah, S. Ip, usia 54 tahun. Beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya selama 3 periode yaitu periode 2004-2009, periode 2009-2014, dan periode 2019-2024. Wawancara ini di lakukan pada tanggal 27 Juli 2023.

b. Sumber Sekunder

1) Buku

- a) Burhanudin Muhtadi. 2012. Dilema PKS: Suara Dan Syariah. Jakarta: Pt Gramedia.
- b) Isharyanto. 2017. Partai Politik, Ideologi Dan Kekuasaan. Yogyakarta: Pt. Absolute Media.
- c) Thomas Meyer. 2012. Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (Fes).
- d) Haniah Hanafie Dan Suryani. 2011. Politik Indonesia. Jakarta: Press.
- e) Ramlan Surbakti. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo.
- f) Rusdi Dan Muhammad April. 2019. Pengantar Ilmu Politik: Dalam Perspektif Barat Dan Islam. Depok: Rajawali Press.

- g) Meriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- h) Kencana Syafie, Ilmu Politik, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2010),
- i) Fajar Tri Sakti. 2020. Sistem Politik Indonesia. Fisip Unpas Press Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

2. Kritik

Tahapan kritik merupakan tahap yang menuntut peneliti atau sejarawan untuk memilah dan memilih mana data-data yang dapat dipercaya atau kredibel. dalam metodologi penelitian sejarah sendiri, kritik dibagi menjadi kritik eksternal dan kritik internal. Kritik ekstern menyangkut otentitas data atau sumber yang didasarkan pada bentuk fisik sumber seperti, asal sumber, tahun atau zaman sumber, begitu pula dengan kondisi fisik sumber atau data. Sedangkan kritik intern menyangkut kredibilitas dari isi data yang diperoleh. Apakah data tersebut merupakan data yang asli atau palsu, apakah dapat dipercaya atau tidak. Untuk mencapai kredibilitas tersebut, biasanya peneliti akan melakukan komparasi data atau membandingkan data yang satu dengan data yang lain. Berikut di bawah ini merupakan data-data yang telah penulis kritik.

a. Kritik Ekstern

1) Sumber Tulisan

- a) Hasil Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2004 Sampai Tahun 2019 Di Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen ini saya dapatkan dari kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk file pdf. Dokumen ini kredibel karena berasal dari sumber yang kredibel.

- b) Raihan Kursi Di DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pada Pemilu Tahun 2004 Sampai Tahun 2019. Dokumen ini saya dapatkan dari kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk file pdf. Dokumen ini kredibel karena berasal dari sumber yang kredibel.
- c) Daftar Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2004 Sampai 2019. Data ini saya dapatkan dari kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk pdf.
- d) Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 006/SKEPJ/AJ-PKS/1439 Tentang Perubahan Struktur Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya Periode 2015-2020. Data ini saya dapatkan dari kantor DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya.
- e) Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat Nomor: 047.PD.2/AJ-PKS/2022 Tentang Struktur Dan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2020-2015. Data ini saya dapatkan dari kantor DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya.
- f) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera. Data ini saya dapatkan dari internet dari situs resmi PKS.
- g) Falsafah Dasar dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera Di Susun Oleh Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Cetakan Ke 1 Tahun 2008. Dokumen ini saya dapatkan dari internet dengan sumber yang kredibel. Sehingga saya menyakini bahwa ini termasuk data yang kredibel.

- h) Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2004/2005. Dokumen ini berisi laporan statistik yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen ini dalam bentuk pdf dan dalam keadaan baik.
- i) Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2009. Dokumen ini berisi data statistik yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen ini dalam bentuk pdf dan dalam keadaan baik.
- j) Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2014. Dokumen ini berisi laporan statistik yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen ini dalam bentuk pdf dan dalam keadaan baik.
- k) Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2019. Dokumen ini berisi laporan statistik yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen ini dalam bentuk pdf dan dalam keadaan baik.
- l) Statistik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022. Dokumen ini berisi laporan statistik yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen ini dalam bentuk pdf dan dalam keadaan baik.

2) Lisan

- a) Wawancara dengan bapak Lukman Farid. Beliau merupakan kepala kesekretariatan DPP Partai Keadilan Sejahtera. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 15 Maret 2022. Beliau telah bergabung dengan PKS dari tahun 2015 sehingga dapat dikatakan kredibel untuk diwawancarai karena sezaman dengan periode yang diangkat penulis yaitu periode 2004-2019. Pada saat diwawancarai beliau dalam keadaan sehat.

- b) Wawancara dengan bapak Ruli Irawan, usia 43 tahun. Beliau menjabat sebagai ketua DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya periode 2020-2025. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 30 Juli 2023. Beliau sendiri telah bergabung dengan PKS dari tahun 1999, sehingga sumber yang didapat kredibel dan dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Pada saat wawancara beliau juga dalam keadaan sehat.
- c) Wawancara dengan Ibu Rossy Hermawaty S. Si, usia 49 tahun. Beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya selama tiga periode yaitu periode 2009-2014, periode 2014-2019, dan periode 2019-2024. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 25 Juli 2023. Beliau sendiri telah bergabung dengan PKS semenjak berdiri, namun tidak di Kabupaten Tasikmalaya. Beliau bergabung dengan DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2003. Data yang diambil dari beliau bisa dikatakan kredibel karena sezaman dengan periode yang diambil. Pada saat wawancara beliau dalam keadaan sehat.
- d) Wawancara dengan bapak Dedi Kurniawan ST. MM, usia 47 tahun. Beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2019-2024. Beliau juga menjabat sebagai sekretaris MPD (Majlis Pertimbangan Daerah) periode 2020-2025. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023. Beliau sendiri telah bergabung dengan PKS sejak awal berdiri, tapi bukan di Kabupaten Tasikmalaya tapi di Kota Bandung. Beliau sendiri masuk ke DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2000. Data yang diperoleh dari beliau dapat dikatakan kredibel karena baik tahun maupun profesinya sesuai dengan

judul penelitian ini. Pada saat di wawancara beliau dalam keadaan sehat.

- e) Wawancara dengan ibu Ucu Dewi Syarifah, S. Ip, usia 54 tahun. Beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya selama 3 periode yaitu periode 2004-2009, periode 2009-2014, dan periode 2019-2024. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 27 Juli 2023. Beliau bergabung dengan PKS sejak awal berdiri tahun 1998. Jadi data yang di peroleh dari beliau bias dikatakan kredibel. Pada saat di wawancara beliau dalam keadaan sehat.

b. Kritik Intern

1) Sumber Tulisan

- a) Hasil Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2004 Sampai Tahun 2019 Di Kabupaten Tasikmalaya. Isi dari data ini sesuai dengan tema pembahasan.
- b) Perolehan Kursi Di DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pada Pemilu Tahun 2004 Sampai Tahun 2019. Isi dari data ini sesuai dengan tema pembahasan.
- c) Daftar Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pada Periode Tahun 2004 Sampai 2019. Data ini berisi data anggota DPRD dari periode 2004 sampai periode 2019 sesuai dengan judul yang dibahas.
- d) Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 006/SKEPJ/AJ-PKS/1439 Tentang Perubahan Struktur Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya Periode 2015-2020. Dokumen ini berisi stuktur organisasi DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya Periode

2015-2020 yang mana data ini dapat di gunakan untuk penelitian ini.

- e) Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat Nomor: 047.PD.2/AJ-PKS/2022 Tentang Struktur Dan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2020-2015. Dokumen ini berisi stuktur organisasi DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya Periode 2020-2025 yang mana data ini dapat di gunakan untuk penelitian ini.
- f) Dokumen Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera.
- g) Dokumen Falsafah Dasar Dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera Yang Di Susun Oleh Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Cetakan Ke 1 Tahun 2008. Dokumen ini berisi tentang falsafah dasar dari pemikiran-pemikiran Partai Keadilan Sejahter amulai dari masalah bernegara sampai berumah tangga. Seperti yang kita tahu bahwa partai ini bermula dari gerakan dakwah atau tarbiah sehingga isi dari data ini juga mencerminkan sikap dan pemikiran mereka menurut pandangan Islam. Data ini tentu sangat relevan apabila di gunakan dalam penelitian ini untuk melihat gambaran PKS lebih dalam.
- h) Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2004/2005. Dokumen ini bersisi laopran statistik yang di keluarkan oleh badan pusat statistik Kabupaten Tasikmalaya.
- i) Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2009. Dokumen ini berisi data statistik yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Tasikmalaya.

- j) Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2014. Dokumen ini berisi laporan statistic yang di keluarkan oleh BPS Kabupaten Tasikmalaya.
- k) Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2019. Dokumen ini berisi laporan statistik yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Tasikmalaya
- l) Statistik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022. Dokumen ini berisi laporan statistik yang di keluarkan oleh BPS Kabupaten Tasikmalaya.

2) Lisan

- a) Wawancara dengan bapak Lukman Farid. Beliau merupakan kepala kesekretariatan DPP Partai Keadilan Sejahtera. Wawancara ini di lakukan pada tanggal 15 Maret 2022. Pada waktu di wawancara beliau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan dengan jelas tentunya sesuai dengan apa yang beliau ketahui.
- b) Wawancara dengan bapak Ruli Irawan, 43 tahun. Beliau menjabat sebagai ketua DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya periode 2020-2025. Wawancara ini di lakukan pada tanggal 30 Juli 2023. Beliau sendiri telah bergabung dengan PKS dari tahun 1999, sehingga sumber yang didapat kredibel dan dapat digunakan sebagai sumber sejarah.
- c) Wawancara dengan Ibu Rossy Hermawaty S. Si, 49 tahun. Beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya selama tiga periode yaitu periode 2009-2014, periode 2014-2019, dan periode 2019-2024. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 25 Juli 2023. Beliau sendiri telah bergabung dengan PKS semenjak berdiri, namun tidak di

Kabupaten Tasikmalaya. Beliau bergabung dengan DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2003. Data yang diambil dari beliau bias di katakan kredibel karena sejaman dengan periode yang diambil.

- d) Wawancara dengan bapak Dedi Kurniawan ST. MM, usia 47 tahun. Beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2019-2024. Beliau juga menjabat sebagai sekretaris MPD (Majlis Pertimbangan Daerah) periode 2020-2025. Wawancara ini di lakukan pada tanggal 23 juli 2023. Beliau sendiri telah bergabung dengan PKS sejak awal berdiri, tapi bukan di Kabupaten Tasikmalaya tapi di Kota Bandung. Beliau sendiri masuk ke DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2000. Data yang di peroleh dari beliau dapat di katakan kredibel karena baik tahun maupun propesinya sesuai dengan judul penelitain ini.
- e) Wawancara dengan ibu Ucu Dewi Syarifah, S.Ip, 54 tahun. Beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya selama 3 periode yaitu periode 2004-2009, periode 2009-2014, dan periode 2019-2024. Wawancara ini di lakukan pada tanggal 27 Juli 2023. Beliau bergabung dengan PKS sejak awal berdiri tahun 1998. Jadi data yang di peroleh dari beliau bias dikatakan kredibel.

3. Interpretasi

Tahap interpretasi adalah tahap penafsirkan terhadap data-data yang telah melewati tahap heuristik dan kritik. Hal ini diperlukan karena, data-data yang telah di peroleh tersebut masih bersifat mentah, belum memberikan makna yang dapat memudahkan peneliti dalam menjabarkan data tersebut menjadi sebuah karya tulis. Interpretasi juga dapat dipahami sebagai tahap analisis data sejarah.

Untuk mempermudah dalam menginterpretasi data-data tersebut, penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan melalui teori-teori yang berhubungan dengan tema kajian dalam penelitian ini.

Adapun teori yang dimaksud antara lain yaitu teori tentang partai politik, komunikasi politik dan juga kampanye politik. Teori-teori ini penulis ambil berdasarkan pada dekatnya hubungan teori tersebut dengan tema kajian penelitian ini.

Kata politik berasal dari bahasa Yunani "*politicos*" yang merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan warga negara. Dalam bahasa Inggris politik memiliki makna yang mencakup kebijaksanaan, beradab, berakal. Secara umum politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan di dalam masyarakat, termasuk proses pengambilan keputusan, terutama di tingkat negara.¹⁷

Politik juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menentukan aturan yang dapat di terima oleh mayoritas penduduk dan menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat.¹⁸

Andrew Heywood menyatakan bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengubah peraturan umum yang mengatur kehidupan yang melibatkan unsur konflik dan kerja sama yang tak terhindarkan.¹⁹

Menurut Rod Hague et al, politik melibatkan cara kelompok-kelompok mencapai keputusan bersama yang mengikat melalui usaha untuk mengatasi perbedaan diantara anggotanya.²⁰

Dalam negara demokratis, yang dimaksud kelompok-kelompok ini juga dapat dianggap sebagai partai politik. Hal ini karena menurut Miriam Budiardjo partai politik pada umumnya adalah sebuah kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan tujuan yang sama. Kelompok ini bertujuan untuk

¹⁷ Pureklolon, *Demokrasi Dan Politik: Menelisik Dinamika Kekuasaan, Sosial, Budaya Dan Pancasila*. Hal 10.

¹⁸ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. hal 15.

¹⁹ Budiardjo. Hal 16.

²⁰ Budiardjo. hal 16.

memperoleh kekuasaan politik dan merebut posisi politik melalui jalur konstitusional guna melaksanakan program-programnya.²¹

Carl J. Friedrich menuturkan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan manfaat yang bersifat idiil serta materil.²²

Menurut Sigmund Neuman partai politik adalah sebuah organisasi yang terdiri dari aktivis politik yang bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan memperoleh dukungan rakyat melalui persaingan kelompok atau golongan lain yang memiliki pandangan yang berbeda.²³

Giovanni Sartori juga mendefinisikan partai politik sebagai sebuah kelompok politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan melalui proses pemilihan tersebut mampu menempatkan kandidat-kandidatnya di posisi-posisi jabatan publik.²⁴

Dalam undang-undang RI No. 31 tahun 2002 pasal 1 di jelaskan bahwa yang dimaksud partai politik adalah organisasi politik yang di bentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Di negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik memiliki peranan penting, salah satunya sebagai media untuk komunikasi politik. Pergerakan informasi di negara tersebut berjalan dalam dua arah, yaitu dari pemerintah ke masyarakat dan juga sebaliknya.²⁵

Menurut Rush dan Althuf, komunikasi politik dapat dijelaskan sebagai proses pengiriman informasi yang berhubungan dengan politik dari satu sistem politik ke sistem politik lainnya, dan keterkaitan antara sistem sosial dan sistem politik

²¹ Budiardjo. hal 404

²² Budiardjo.

²³ Budiardjo.

²⁴ Budiardjo. hal 405.

²⁵ Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik*. hal 14.

merupakan elemen yang dinamis dalam suatu sistem politik. Selain itu, proses sosialisasi, partisipasi dan rekrutmen politik juga tergantung dari komunikasi.²⁶

Sukses atau tidaknya suatu partai politik dalam sistem demokrasi di tentukan dari perolehan jumlah suara yang di peroleh pada saat kontestasi pemilihan dalam hal ini bisa disebut juga pemilu atau pemilihan umum. Maka dari itu partai politik perlu menyusun sttategi untuk mendulang suara pada saat kampanye berlangsung.

Kampanye politik secara umum dapat diartikan sebagai upaya yang teratur dan terencana untuk mendukung pencalonan, dan pemilihan seseorang dalam sebuah jabatan resmi.

Menurut Arnold Steinberg kampanye politik adalah cara yang digunakan para warga negara dalam demokrasi untuk menentukan siapa yang akan memerintah mereka.²⁷

Menurut UU tahun 2003 pasal 1 kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih. Dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2005 pasal 1, kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon yang akan mencalonkan dan informasi lainnya, dan bertujuan mengenalkan dan meyakinkan pemilih.²⁸

Dari beberapa teori yang sudah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa partai politik secara sederhananya adalah organisasi yang terdiri dari aktivis politik yang memiliki tujuan, pandangan dan cita-cita yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan anggota dan masyarakat secara umumnya melalui proses pemilihan umum. Dari hal ini juga dapat dimengerti bahwa sukses atau tidaknya suatu partai politik tergantung dari jumlah perolehan suara dalam pemilihan umum tersebut. Untuk memperoleh jumlah suara yang diharapkan tersebut, tentunya partai politik perlu mempertimbangkan bagaimana metode dan strategi dalam mengaet suara rakyat sebanyak-banyaknya. Hal ini yang kemudian dinamakan

²⁶ Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia*. Hal 24.

²⁷ Pito, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Hal 186.

²⁸ Heryanto, *Publik Relation Politik*. hal 83.

strategi kampanye politik. Kajian tentang strategi kampanye ini yang kemudian penulis akan gambarkan pada tahapan berikutnya yaitu tahapan historiografi.

4. Historiografi

Tahapan terakhir dalam metode penulisan sejarah adalah tahapan historiografi. Historiografi merupakan proses penyusunan dari fakta sejarah yang sudah di analisis atau di interpretasi dalam suatu bentuk karya tulis sejarah.

Dalam tahapan ini penulis merekonstruksi peristiwa sejarah berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh pada tahapan-tahapan sebelumnya. Untuk mempermudah pemahaman, dalam tahapan ini penulis membagi pembahasan dalam beberapa bab dan sub bab. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini akan di susun sebagai berikut:

Bab I penulis disini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka serta metode atau langkah-langkah penelitian seperti (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi). Dalam bab ini penulis berupaya untuk mengarahkan pembaca pada tahap-tahap atau langkah-langkah penelitian sebagai suatu pijakan dalam pembahasan berikutnya.

Bab II berisi penjelasan mengenai kondisi sosial politik Kabupaten Tasikmalaya. Bab ini juga menjelaskan tentang sejarah perkembangan PKS di Indonesia dan di Kabupaten Tasikmalaya.

Bab III menguraikan tentang strategi kampanye PKS pada pemilu tahun 2004-2019 di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam bab ini akan diuraikan tentang profil singkat dari PKS, kemudian perkembangannya di Kabupaten Tasikmalaya, berikutnya mengurai pokok pembahasan yaitu strategi kampanye yang digunakan PKS pada pemilu tahun 2004-2019 di Kabupaten Tasikmalaya, tingkat perolehan suara yang di peroleh PKS di Kabupaten Tasikmalaya pada pemilu tahun 2004-2019, kemudian analisis tentang dampak strategi kampanye terhadap jumlah perolehan suara yang di peroleh Juga akan di bahas mengenai faktor-faktor yang menghambat strategi

kampanye tersebut. Selain itu sebagai tambahan pada bab ini juga akan sedikit membahas tentang strategi kampanye pada pemilu mendatang (2024).

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari rangkai materi yang di jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Tak lupa pada bagian akhir juga di sertakan daftar pustaka dan lampiran sebagai penutup.

